



SAMPAIKAN PANDANGAN LKPJ 2021

PDIP Soroti Anggaran Masterplan Kelurahan

YOGYA (KR) - Fraksi PDIP DPRD Kota Yogya memberikan catatan khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Yogya 2021. Salah satunya menyoroti perihal anggaran pembuatan masterplan kelurahan yang patut diduga menyalahi aturan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogya GM Dedy Jati Setiawan melalui juru bicara fraksi Ipung Purwandari, mengungkapkan ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi atas kegiatan yang diadakan Pemkot Yogya yang berbasis kewilayahan. "Salah satunya pembuatan masterplan kelurahan yang ada di Kota Yogya pada anggaran perubahan tahun 2021 lalu," ungkapnya, Minggu (26/6).

Dedy mengaku, pandangan umum fraksinya tersebut telah disampaikan secara resmi pada sidang paripurna Jumat (24/6) lalu. Pihaknya pun akan meminta penjelasan kepada jajaran eksekutif kendati tahun anggaran tersebut masih digawangi oleh kepala daerah yang kini sudah tidak lagi menjabat.

Sorotan tersebut karena hasil kajian belum dilaksanakan namun

telah direview oleh pihak kemantren. Di samping itu mekanisme penentuan pihak ketiga, khususnya di wilayah Kemantren Umbulharjo dengan tujuh kelurahan dilakukan secara swakelola dan penunjukan langsung. Total anggaran untuk kegiatan tersebut pada APBD perubahan 2021 mencapai hampir Rp 1,3 miliar untuk 43 kelurahan. "Kami mendesak untuk segera diadakannya penyelidikan lebih lanjut atas indikasi tindak korupsi tersebut," tandasnya.

Selain perihal anggaran masterplan kelurahan, Fraksi PDIP juga memberikan empat catatan lain pada LKPJ 2021. Di antaranya menyangkut penertiban reklame yang berkaitan dengan pajak daerah, optimalisasi BUMD untuk menopang ekonomi daerah serta transparansi bantuan keuangan khusus (BKK) dari DIY terkait dana

keistimewaan.

Dalam pandangan umum atas LKPJ 2021 tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Yogya juga menyampaikan pernyataannya. Seperti Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Oleg Yohan terkait ketercapaian target dari pemerintah pusat yakni Kota Yogya berhasil merdeka vaksin. Hal tersebut dinilai sesuai dengan semangat tema pembangunan tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu juru bicara Fraksi PKS Triyono Hari Kuncoro memberikan apresiasi atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2021, setelah sempat menurun di tahun 2020. Kendati masih dalam masa pandemi Covid-19 namun pembangunan ekonomi daerah tetap berjalan optimal.

Seluruh pandangan umum fraksi tersebut diterima secara utuh oleh tim eksekutif. Sesuai jadwal, Pemkot Yogya akan memberikan jawaban secara resmi dalam sidang paripurna pada 1 Juli 2022 mendatang. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005